

KAJIAN CONSPIRACY THEORY PADA KEPALA DAERAH MELALUI INSTRUMEN PBB-P2 DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Rachmad Kresna Sakti¹

1. Economics Department, Universitas Brawijaya, Indonesia
E-mail: kresnayangsakti@gmail.com

Abstract

The delegation of authority to manage the Land and Building Tax on Rural and Urban (PBB-P2) from the provincial government to the district / city government provides an opportunity for the district / city government to get additional Regional Original Revenue (PAD). But the fact that what happens is that the PAD revenues are sourced from UN-specific taxes which experience abnormal fluctuations. This is indicated by the interests of regional heads who want to maintain the stability of their territory through populist policies. To look deeper into this matter, the qualitative method is used by utilizing the literature study approach as an approach in completing this study. The findings obtained are proven to be a link between the increase in the UN-P2 revenue target and the periodization of regional heads (regents / mayors) in which the regional head who nominates again as regional head for the second period will loosen policy towards PBB-P2. But when it has been chosen definitively, the policy against PBB-P2 will return to strict. However, this connection cannot occur in the regions (regencies and / or cities) under certain conditions

Keywords: Tax Policy, Land and Building Tax in Rural and Urban Areas (PBB-P2), Periodization of Regional Head.

JEL Classification: H71, K34, P48

1. PENDAHULUAN

Strategisnya posisi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terpublikasi melalui beberapa hasil penelitian baik secara umum (Astheria, 2015; Fadly, 2016; Nasir, 2019), maupun spesifik (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014; Purwadinata, 2016; Saputro, Sudjana, & Azizah, 2014). Terlebih bagi pemerintah daerah yang memperoleh tambahan penerimaan bersumber dari pajak, maka tambahan tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah karena tambahan tersebut dapat berperan sebagai penyeimbang fungsi *budgetair* (Bagijo, 2011).

Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi kabupaten/kota terhadap tambahan penerimaan pajak karena dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka kabupaten/kota akan menerima tam-

bahan pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tambahan tersebut berasal dari pajak bumi dan bangunan yang semula dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota hanya mendapatkan bagi hasilnya menjadi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, tambahan penerimaan pajak tersebut tidak selamanya mampu menjadi penyeimbang fungsi *budgetair* secara baik karena pertumbuhan penerimaan pajak PBB tidak selamanya tercatat positif.

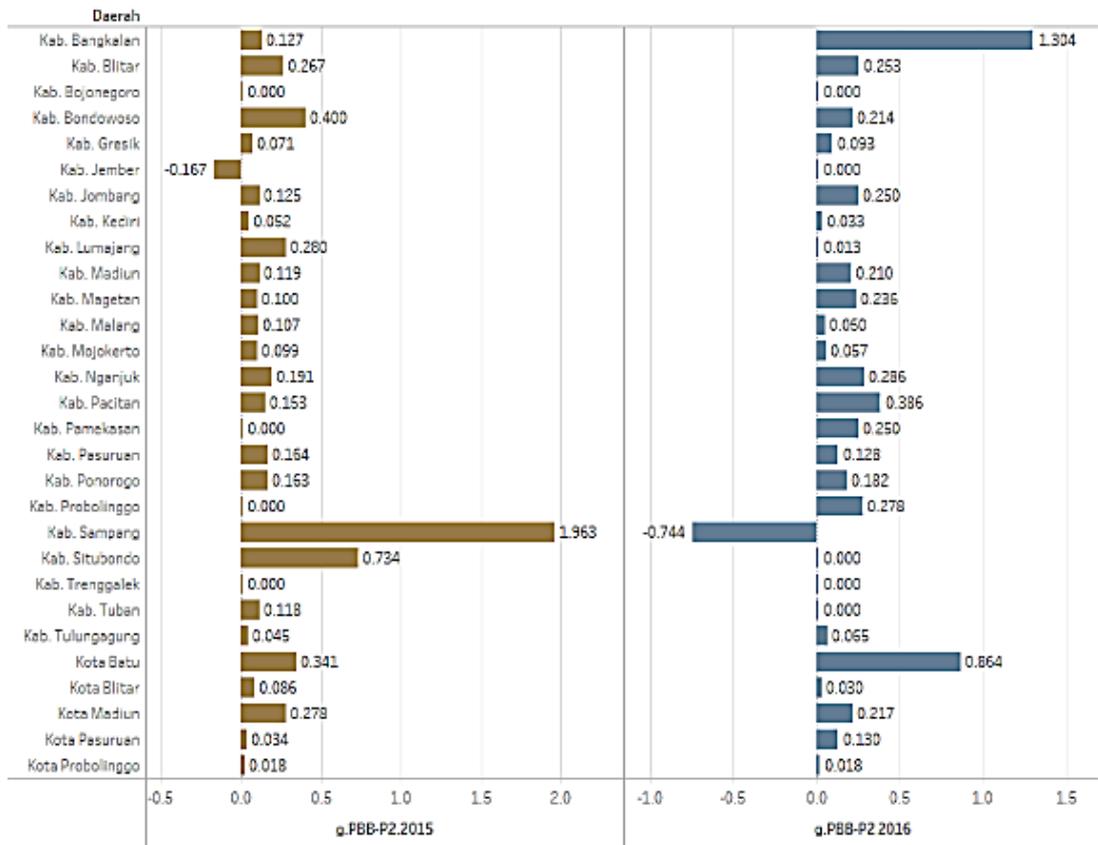
Melihat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten/kota di Jawa Timur sebagaimana gambar 1 di bawah, akan diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi menjadi tiga kelompok yakni: *i*) daerah dengan pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0 (*null*) persen; *ii*) daerah dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) yang positif; dan *iii*) daerah dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara negatif.

Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar nol persen atau negatif salah satunya disebabkan oleh realisasi janji kepala daerah terpilih mengenai pajak tersebut pada saat masa kampanye berlangsung (Manihuruk, 2019). Realisasi tersebut harus terlaksana mengingat hal itu telah dijanjikan dan tidak dapat pula dikatakan bahwa pada saat berkampanye, kepala daerah tersebut tidak mengetahui konsekuensi janjinya (pajak) terhadap penerimaan keuangan daerah. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan politik telah mempengaruhi keputusan dalam kebijakan keuangan daerah dan dapat dikatakan wajar pula ketika terdapat periode di mana efektivitas PBB menjadi le-

bih rendah dibandingkan dari tahun sebelumnya (Wicaksono & Pamungkas, 2017). Pertimbangan politik ini juga dapat dirasakan dengan banyaknya daerah yang memanfaatkan dana transfer sebagai sumber pengeluaran/pembiayaan daerah dari pada yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Nurdini, Wiratno, & Farida, 2015; Sulistiyana, Samudro, & Pratama, 2015) atau yang dikenal dengan istilah *flypaper effect* (Oktavia, 2014).

Pengejawantahan terhadap kebijakan populis terindikasikan pada kondisi kepala daerah yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat pada periode pertama menjabat sehingga modal sosial yang dimiliki akan tetap terjaga dan hal ini akan mempermudah proses pemilihan pada periode berikutnya.



Gambar 1. Pertumbuhan PBB-P2 di Kabupaten Kota Jawa Timur 2015-2016

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Meminjam konsep teori konspirasi, diketahui bahwa setiap kepala da-

erah perlu untuk meredam emosi publik jika ingin terpilih kembali pada pe-

riode kedua dengan cara menjaga popularitas yang dimiliki oleh setiap kepala daerah. Guna menghindari emosi publik tersebut, maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tidak menimbulkan efek negatif (gejolak pada masyarakat) atau dengan kata lain, dapat dikatakan pula terdapat konspirasi pada tingkat individu yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan melalui penetapan kebijakan. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa dengan adanya konspirasi kemudian dapat diperoleh kesimpulan antara “benar” dan “salah” atau “baik” dan “buruk” karena teori konspirasi ini memiliki sifat epistemologis yang unik (Uscinski, 2018).

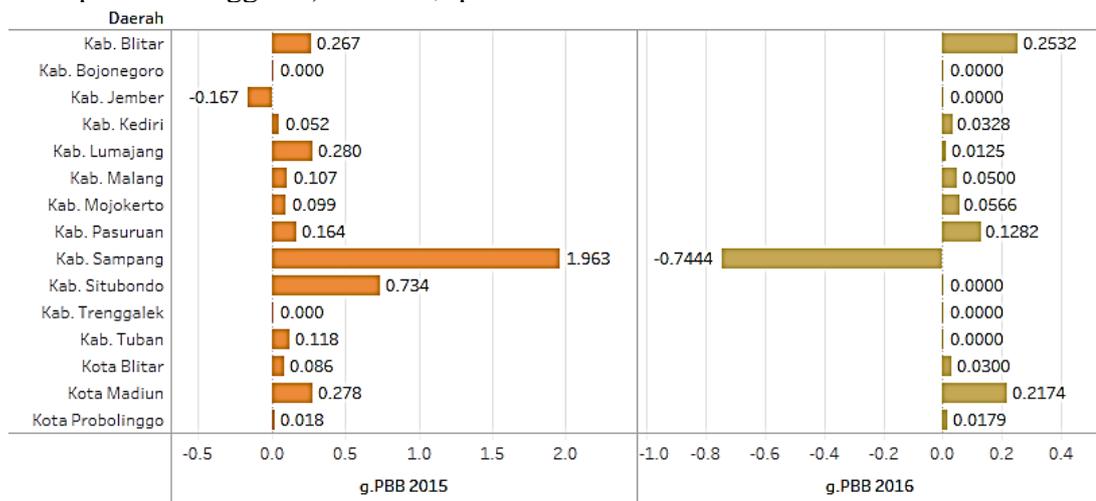
Hal ini terindikasi dari pertumbuhan PBB-P2 pada beberapa kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan secara tidak normal pada tahun 2015 dan 2016 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan 3 (tiga) kelompok besar terhadap penerimaan PBB-P2 yang ada di daerah tersebut. Pertama, pertumbuhan besaran penerimaan PBB-P2 sebesar 0 (*null*) yang berarti tidak ada pertumbuhan besaran penerimaan PBB-P2 dari tahun sebelumnya (Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Trenggalek). Kedua, per-

tumbuhan negatif pada tahun 2015 dan tidak ada pertumbuhan dari besaran penerimaan PBB-P2 positif pada tahun 2016 (Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban). Ketiga, pertumbuhan yang lebih kecil (negatif) pada tahun 2016 berbanding dengan besaran penerimaan PBB-P2 tahun 2015 (Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kota Blitar, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo).

Merujuk pada keterkaitan antara pemilihan kepala daerah dengan kebijakan publik sebagaimana penjelasan di atas, maka hendak dilakukan kajian dengan judul “Kajian *conspiracy theory* pada kepala daerah melalui instrumen PBB-P2 di kabupaten/kota di Jawa Timur”.

Melalui penjabaran mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan rencana pemilihan kepala daerah periode kedua sebagaimana yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka masalah yang hendak dikemukakan pada penelitian ini adalah, “Bagaimanakah keterkaitan antara PBB-P2 dengan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur?”



Gambar 2. Pertumbuhan (g) PBB-P2 2015-2016
 Sumber: Data BPS di olah

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dynamic games telah lama digunakan para ekonomi untuk mengana-

lisis permasalahan-permasalahan seperti: kontribusi dinamis untuk barang publik, eksploitasi sumber daya umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, pasar oligopoli, penerapan tarif secara optimal berkaitan dengan tindakan balasan, kebijakan lingkungan yang tidak kooperatif, perlombaan senjata dan juga penerapan pajak redistributif kepada agen yang memiliki wawasan.

Permainan dinamis pada pajak redistributif dilakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui program-program yang telah disusun oleh pemerintah dan dibebankan kepada setiap warga negara secara sama dan dapat pula bersifat progresif.

Beberapa ciri yang muncul pada permainan dinamis (*dynamic games*) ini yaitu (Long, 2010):

- 1) *The players may receive payoffs in every period (or at every point of time);*
- 2) *The overall payoff for a player is the sum (or integral) of its discounted payoffs over the time horizon, possibly plus some terminal payments;*
- 3) *The payoff that a player receive in a period may depend on both the actions taken in that period and the "state of the system" in that period, as represented by one or several "state variables";*
- 4) *The state of the system changes over time, and the rate of change of the state variables may depend on the actions of the players, as represented by their "control variables"; and*
- 5) *The rate of change of a state variable is described by difference equation or a differential equation, often called the "transition equation" or "dynamic equation".*

Penerapan dari permainan dinamis terhadap pajak ini dapat dilihat salah satunya pada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per-

kotaan (yang selanjutnya disebut PBB-P2) di mana pengenaannya memang tidak secara eksplisit mengatakan progresif namun ditentukan oleh zonasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Besaran tarif terhadap PBB-P2 dapat berubah bergantung pada kondisi terbaru yang terjadi (sebagaimana yang disebutkan pada ciri di atas), di mana variabel kontrol memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan tersebut.

Teori konspirasi (secara umum) dapat diterjemahkan sebagai "*an effort to explain some event or practice by reference to the machinations of powerful people, who have also managed to conceal their role*" (Sunstein & Vermeule, 2008).

Teori konspirasi secara umum memiliki hubungan antara agen tertentu untuk melakukan tindakan perencanaan dengan tujuan menjaga rahasia atau bahkan dapat juga bertujuan untuk mengendalikan orang lain. Dipercaya pula bahwa agen yang bertindak adalah orang yang memiliki kekuasaan sebagai akibat dari informasi yang keliru atau didasarkan pada konsensus sosial yang rapuh. Sehingga konspirasi sendiri tidak dapat dipisahkan dari sebuah mekanisme yang dapat memicu amarah dan kebencian. Namun demikian, seringkali konspirasi memiliki argumentasi yang kuat dan rasional (masuk akal) sehingga akan sulit bagi orang lain untuk membantah atau bahkan mempertanyakan ulang tindakan tersebut. Cakupan yang lebih luas menjelaskan bahwa teori konspirasi seringkali melebih-lebihkan kompetensi dan kebijakan dari para agen yang memiliki kekuasaan di mana mereka diyakini mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah rahasia secara sistematis.

Namun demikian, hal ini hanya akan efektif apabila diterapkan atau terjadi ketika kondisi informasi benar-

benar tertutup dan tidak dalam kondisi di mana informasi dapat diakses oleh banyak pihak dalam waktu yang tidak terbatas (kapan-pun).

Konspirasi ini sendiri dilakukan untuk mengambil manfaat yang tidak hanya terbatas pada aktivitas politik, namun lebih dari itu yang dapat meluas pada bidang sosial, ekonomi ataupun lainnya. Atau dapat juga dikatakan,

“... *Conspiratorial reasoning is following the particular interests or the beneficiaries in order to determine their implication as usurpers of the spontaneous order; it can be extended beyond the „visible” scene of economy to the „invisible” one, to the top, where the decision-making elites are responsible for resource exploitation, triggering wars, military industry, population control, etc. ...*” (Calance, Diacon, & Donici, 2014).

Berkaitan dengan adanya konspirasi yang dilakukan oleh para agen, maka hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa seringkali para agen yang melakukan tindakan konspirasi bukan tanpa pemahaman akan konsekuensi yang muncul di masa yang akan datang. Dengan kata lain, para agen tersebut telah mengabaikan satu sisi dari sisi lainnya untuk menjalankan konspirasi yang telah direncanakan tersebut.

Konspirasi yang telah direncanakan atau bahkan telah dijalankan tersebut tidak berarti dapat diketahui orang lain karena ketika informasi menjadi mudah untuk diakses, maka masyarakat akan mampu untuk menganalisis. Dengan demikian, pengabaian akan menyiratkan bahwa banyak dari kebijakan yang saat ini ditempuh pada akhirnya akan terbukti secara sistematis terjadi (bekerja) karena suatu kesalahan daripada pertimbangan (politik) yang menyimpang (Congleton, 2001; Rothstein & Stolle, 2008; Zait, Andrei, Bobalca, & Tugulea, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah menangkap mengenai fenomena efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dirangkum sebagaimana berikut. Nurbawono (2016) melakukan penelitian tentang bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo dengan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi permasalahan yang timbul dari adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan mengetahui kontribusi pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oktavia (2014) mengkaji mengenai fenomena serial waktu dan lintas kabupaten kota di Jawa Timur untuk periode 2003 hingga 2013 dengan memperoleh kesimpulan bahwa terdapat *flypaper effect* yang terindikasi melalui pengaruh dana alokasi umum yang lebih signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Leiser, Duani, & Wagner-Egger (2017) melalui penelitiannya yang berjudul *The conspiratorial style in lay economic thinking* meneliti tentang rangkaian analisis secara menyeluruh yang memunculkan pandangan ganda tentang ekonomi di mana salah satu kesimpulan yang diperoleh adalah adanya kegagalan yang dikaitkan dengan disfungsi pihak berwenang (*government*) kepada kelompok kuat yang memanipulasi pasar untuk memajukan kepentingan mereka.

Berkaitan dengan pajak dan kekuasaan yang dimiliki, diketahui bahwa pejabat yang berkuasa akan menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan posisinya agar dapat menjabat selama dua periode dengan berbagai cara yang termasuk salah satunya

adalah melakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (Junaidi, 2010).

Merujuk pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka kerangka penelitian yang disusun diketahui sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3 merupakan ilustrasi yang ditulis mengenai kerangka penelitian di mana kepala daerah diasumsikan memiliki ekspektasi untuk menjabat (lagi) pada periode kedua yang diketahui melalui 3 (tiga) pendekatan yakni: pendekatan kebijakan politik, keputusan politik dan keuangan negara dan daerah, sehingga *flypaper effect* terjadi dan salah satunya terindikasi melalui kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di kabupaten kota di Jawa Timur. Ketiga pendekatan tersebut akan ditelaah lebih mendalam dengan menggunakan *conspiracy theory* dan *dynamic games*. Kerangka penelitian

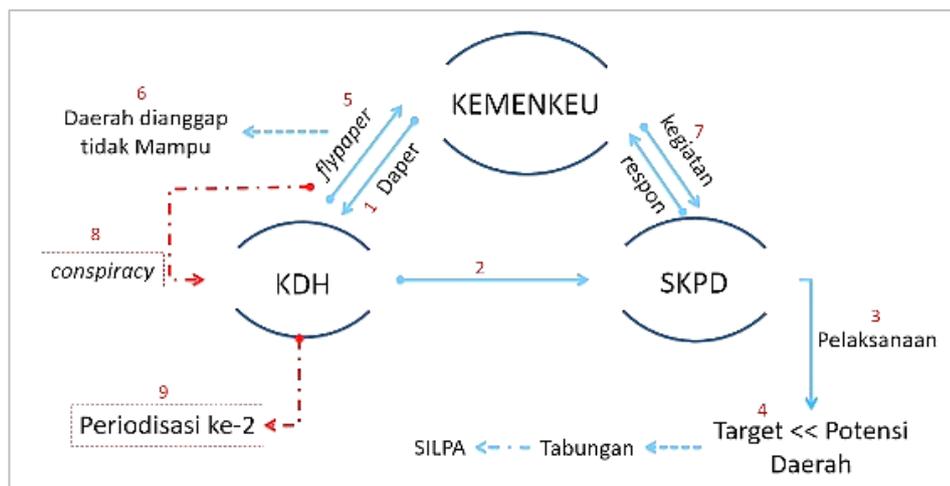
tersebut akan dapat dipahami secara lebih mudah dan lebih jelas melalui kerangka konsep sebagaimana dijelaskan pada gambar 4.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu (Sugiono, 2004), di mana pada penelitian ini, untuk mencapai cara ilmiah tersebut digunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri pada dasarnya menyajikan/memaparkan hasil kajian pustaka yang diolah berdasarkan argumentasi dan penalaran keilmuan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Penelitian kajian pustaka memuat beberapa gagasan/proposisi yang berkaitan dan harus didukung oleh data/informasi yang berasal dari sumber pustaka.



Gambar 3. Kerangka Penelitian
 Sumber: Ilustrasi penulis, 2019



Gambar 4. Kerangka Konsep
 Sumber: Ilustrasi penulis, 2019

Berdasarkan teorinya, sumber data dapat dikategorikan menjadi dua

yakni sumber tertulis dan tidak tertulis (Abdurrahman, 2007). Dalam artian

luas, dokumen dapat diklasifikasikan menjadi 8 kategori (Gottschalk, 1983), yakni: rekaman sezaman; laporan konfidensial; laporan umum; kuesioner; dokumen-dokumen pemerintah; pernyataan opini; fiksi; dan folklore (Kartodirdjo, 1974). Sedangkan sumber tidak tertulis dapat berupa: penyebaran lisan (*oral tradition*) tentang kejadian yang baru atau peristiwa yang masih terekam dalam ingatan orang, dan penyebaran lisan tentang peristiwa-peristiwa yang tipis kemungkinan terjadinya (*remote events*) (Abdurrahman, 2007). Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen pemerintah secara resmi seperti: Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), maupun sumber resmi lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Obyek dilakukannya penelitian pada riset ini adalah seluruh kepala daerah yang ada di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2015 hingga 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ditambahkan hasil statistik untuk melihat pola pada kebijakan yang ditempuh kepala daerah pada periode kedua masa jabatannya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini dilakukan dan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni: *pertama*, melakukan pendalaman informasi pada literatur yang ada; *kedua*, mengkonfrontasikan literatur dengan realitas/fakta yang ada berdasarkan data yang telah terpublikasikan; dan *ketiga*, mengambil kesimpulan serta saran dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal mengkonfrontasi dengan realitas/data yang ada akan dilakukan penyaringan data terhadap kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyaringan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisi-

sir bias pada hasil yang didapatkan dengan pertimbangan:

- 1) Tidak semua kepala daerah berhasil mempertahankan posisinya terutama dalam era demokrasi di mana periode pertama akan menjadi salah satu bahan evaluasi apakah masyarakat akan memilih kembali kepala daerah yang sedang menjabat (*incumbent*).
- 2) Daerah yang akan menjadi obyek observasi adalah daerah dengan kepala daerah yang mampu menyelesaikan periode masa jabatannya serta tidak memiliki masalah dengan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, apabila kepala daerah memiliki suatu persoalan dengan hukum baik yang di dalam maupun luar negeri, maka kepala daerah tersebut tidak dapat aktif memimpin daerah terlebih mengambil keputusan strategis terkait dengan sumber penerimaan daerah.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pajak yang menjadi sumber pendapatan utama di Indonesia memiliki peran tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Lebih spesifik, pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu jenis pajak yang besarnya ditentukan oleh kepala daerah di mana seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan yang dominan untuk pembiayaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur (Susilo, 2017), dapat berubah menjadi alat politik dalam mempertahankan basis suara pemilih kepala daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sangat efektif (Adelina, 2013), sehingga perubahan pada besaran pajak bumi dan bangunan

akan berpengaruh terhadap suara pemilih.

Perihal ini dapat dilihat pada bagaimana kondisi yang terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur di mana diketahui secara umum bahwa Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang berarti terdapat 38 kepala daerah yang memimpin setiap periodenya. Dalam hal ini (periode observasi 2015-2016), tidak seluruh kabupaten/kota menjadi obyek analisis dikarenakan harus dilakukan filtrasi terhadap data-data yang tersedia.

Filtrasi pertama dapat dilakukan dengan memilah daerah (kabupaten/kota) yang pada tahun observasi (2015-2016) dipimpin oleh kepala daerah yang telah memimpin selama dua periode dan mengeluarkan kabupaten/kota yang sedang dipimpin oleh kepala daerah baru (1 periode). Sehingga didapatkan hasil yakni 14 kepala daerah (36,84 persen) tidak masuk ke dalam observasi karena masih memimpin selama 1 periode yang antara lain yakni: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 24 kepala daerah (63,16 persen) sedang menjabat untuk periode kedua. Berdasarkan data tersebut, masih harus dilakukan filtrasi kedua yakni memilah data berdasarkan kepala daerah yang menyelesaikan periode masa jabatannya atau dengan kata lain bagi kepala daerah yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya karena kondisi tertentu, maka daerah tersebut tidak akan masuk ke dalam penghitungan.

Pada penelitian ini, kepala daerah yang tidak dapat menyelesaikan perio-

de masa jabatannya dikarenakan harus berurusan dengan hukum sehingga asumsi yang dibentuk yakni kepala daerah tersebut tidak akan menempuh kebijakan strategis lebih jauh mengenai permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun daerah yang kembali di *sortir* adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun dan Kota Batu. Dengan demikian, sampel yang diteliti pada penelitian ini menjadi 18 kabupaten kota di Jawa Timur dengan kriteria periode masa jabatan kepala daerah adalah dua periode dan kepala daerah tersebut tidak sedang berurusan dengan hukum pada periode observasi (2015-2016) atau secara rinci dua tahap *sortir* dirangkum sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Filtrasi Data (*sortir*) Kepala Daerah

Keterangan	Jumlah	%
Menjabat 2 Periode	18	47.37%
Menjabat 1 Periode	14	36.84%
Tersangkut Kasus	6	15.79%
Jumlah KDH di Jawa Timur	38	100.00%

Sumber: data diolah

Pada tahapan berikutnya, adalah melihat bagaimana pola pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun observasi dengan kepala daerah yang sedang menjabat selama dua periode yang secara detil diketahui melalui tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bagaimana penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat berfluktuatif secara signifikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan selama dua tahun untuk 18 kabupaten/kota sebesar 15,61 persen. Adapun kemungkinan yang dapat terjadi melalui data tersebut akan dijabarkan pada sub-bab berikut ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan PBB Berdasarkan Daerah dengan Kepala Daerah yang Memiliki Masa Jabatan 2 Periode

No.	Kab/Kota	Periode Jabatan		Pertumbuhan Penerimaan PBB	
		I	II	2015	2016
1	Kab. Banyuwangi	2010-2015	2016-2021	-46.56%	13.31%
2	Kab. Bojonegoro	2008-2013	2013-2018	0.00%	0.00%
3	Kab. Bondowoso	2008-2013	2013-2018	40.00%	21.43%
4	Kab. Gresik	2010-2015	2016-2021	7.14%	9.33%
5	Kab. Jember	2005-2010	2010-2015	-16.67%	0.00%
6	Kab. Kediri	2010-2015	2016-2021	5.17%	3.28%
7	Kab. Lamongan	2010-2015	2016-2021	30.95%	22.51%
8	Kab. Madiun	2008-2013	2013-2018	11.94%	21.02%
9	Kab. Magetan	2008-2013	2013-2018	10.00%	23.64%
10	Kab. Nganjuk	2008-2013	2013-2018	19.10%	28.63%
11	Kab. Ngawi	2010-2015	2016-2021	8.48%	28.22%
12	Kab. Pacitan	2011-2016	2016-2021	15.28%	38.55%
13	Kab. Sidoarjo	2010-2015	2016-2021	3.33%	9.61%
14	Kab. Situbondo	2010-2015	2016-2021	73.41%	0.00%
15	Kab. Sumenep	2010-2015	2016-2021	-13.38%	17.68%
16	Kab. Tuban	2011-2016	2016-2021	11.80%	0.00%
17	Kota Blitar	2010-2015	2016-2021	43.60%	0.74%
18	Kota Surabaya	2010-2015	2016-2021	34.15%	86.36%

Sumber: data diolah

Melalui tabel 2, dapat diketahui bagaimana pola pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan kewenangan untuk mengatur besaran pajak berada di masing-masing daerah. Melalui tabel itu pula, dapat diketahui terdapat tiga pola yang terbentuk yakni:

- 1) Kepala daerah yang pada masa jabatan kedua menaikkan target penerimaan yang bersumber dari PBB;
- 2) Kepala daerah yang pada masa jabatan kedua tidak merubah target penerimaan yang bersumber dari PBB; dan
- 3) Kepala daerah yang pada masa jabatan kedua menaikkan namun kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya.

Merinci pada data di atas, dapat dirangkum bahwa mayoritas kepala daerah memilih untuk meningkatkan target penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan dengan proporsi yang sama kepala daerah memilih untuk menurunkan target dan memilih untuk tidak mengubah target

yang secara rinci dapat dilihat melalui tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perubahan Target Penerimaan PBB di 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Keterangan	Jumlah	%
Target Naik (tumbuh positif)	10	55.56%
Target Tetap	4	22.22%
Target turun (tumbuh negatif)	4	22.22%
Total	18	100%

Sumber: data diolah

Lebih detail, dapat diketahui pula bahwa tabel 3 di atas menjelaskan sejumlah 10 kepala daerah (55,56 persen) menaikkan target penerimaan daerah yang bersumber dari PBB-P2 dan sejumlah 4 kepala daerah (22,22 persen) lebih memilih untuk tidak mengubah target penerimaan daerah yang bersumber dari PBB-P2 serta 4 kepala daerah (22,22 persen) menurunkan target penerimaan. Agar tidak menimbulkan kerancuan, maka perlu dijelaskan pula mengenai definisi dari target yang naik dan turun. Definisi tersebut dijelaskan pada poin berikut

- 1) Target naik diterjemahkan sebagai terjadinya peningkatan target secara nominal disertai dengan pening-

katan persentase (%) secara positif.

- 2) Target turun diterjemahkan sebagai terjadinya peningkatan target secara nominal namun secara persentase (%) pertumbuhan mengalami penurunan. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan secara positif namun besarnya lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya.

Dengan demikian berdasarkan dua hal yang terbentuk di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa kepala daerah yang memilih untuk menaikkan target penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebanyak 14 kepala daerah (77,78 persen) dan yang memilih untuk mengubah target penerimaan adalah sebanyak 4 kepala daerah (22,22 persen).

Tabel 4. Proporsi Target Penerimaan PBB di 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Keterangan	Jumlah	%
Target Penerimaan PBB-P2 Meningkat	14	77.78%
Target Penerimaan PBB-P2 tidak berubah (tetap)	4	22.22%
Total	18	100.00%

Sumber: data diolah

Target yang Meningkat

Peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan cenderung dilakukan oleh kepala daerah ketika memasuki periode kedua. Hal ini disebabkan oleh karena kepala daerah tidak lagi memiliki kepentingan untuk periode berikutnya. Periode berikutnya yang dimaksud adalah periode ketiga mengingat berdasarkan undang-undang hal tersebut tidak dimungkinkan, sehingga pada periode kedua tersebut, kepala daerah dapat lebih fokus dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Adapun daerah-daerah yang mengalami peningkatan target penerimaan PBB-P2 yakni: Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya.

Peningkatan target penerimaan terbesar terjadi di Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 59,87 persen diikuti oleh Kota Surabaya sebesar 52,28 persen, kemudian Kabupaten Sumenep 31,06 persen, Kabupaten Pacitan 23,28 persen, Kabupaten Ngawi 19,73 persen, dan terakhir Kabupaten Magetan 13,64 persen. Sedangkan sisanya, peningkatan target PBB-P2 tidak lebih dari 10 persen.

Tabel 5. Kepala Daerah (Kab/Kota) yang Meningkatkan Target PBB pada Periode Kedua Masa Jabatan

No.	Kab/Kota	Periode Jabatan		Pertumbuhan Penerimaan PBB	
		I	II	2015	2016
1	Kab. Madiun	2008-2013	2013-2018	11.94%	21.02%
2	Kab. Magetan	2008-2013	2013-2018	10.00%	23.64%
3	Kab. Nganjuk	2008-2013	2013-2018	19.10%	28.63%
4	Kab. Banyuwangi	2010-2015	2016-2021	-46.56%	13.31%
5	Kab. Gresik	2010-2015	2016-2021	7.14%	9.33%
6	Kab. Ngawi	2010-2015	2016-2021	8.48%	28.22%
7	Kab. Sidoarjo	2010-2015	2016-2021	3.33%	9.61%
8	Kab. Sumenep	2010-2015	2016-2021	-13.38%	17.68%
9	Kota Surabaya	2010-2015	2016-2021	34.15%	86.36%
10	Kab. Pacitan	2011-2016	2016-2021	15.28%	38.55%

Sumber: data DJPK diolah

Target yang Tetap

Adapun daerah yang tidak mengalami perubahan terhadap penerimaan

daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Jember.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari PBB-P2 tidak mengalami perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi normal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah disebabkan oleh karena Pajak PBB-P2 bukanlah sumber pendapatan yang krusial dan menjadi perhatian utama bagi kepala daerah atau dapat juga disebabkan oleh karena faktor daya beli masyarakat yang rendah sehingga untuk dapat meningkatkan PBB-P2 akan menimbulkan masalah yakni berhubungan langsung dengan komplain masyarakat.

Adapun faktor yang menjadi penyebab bahwa PBB-P2 bukanlah men-

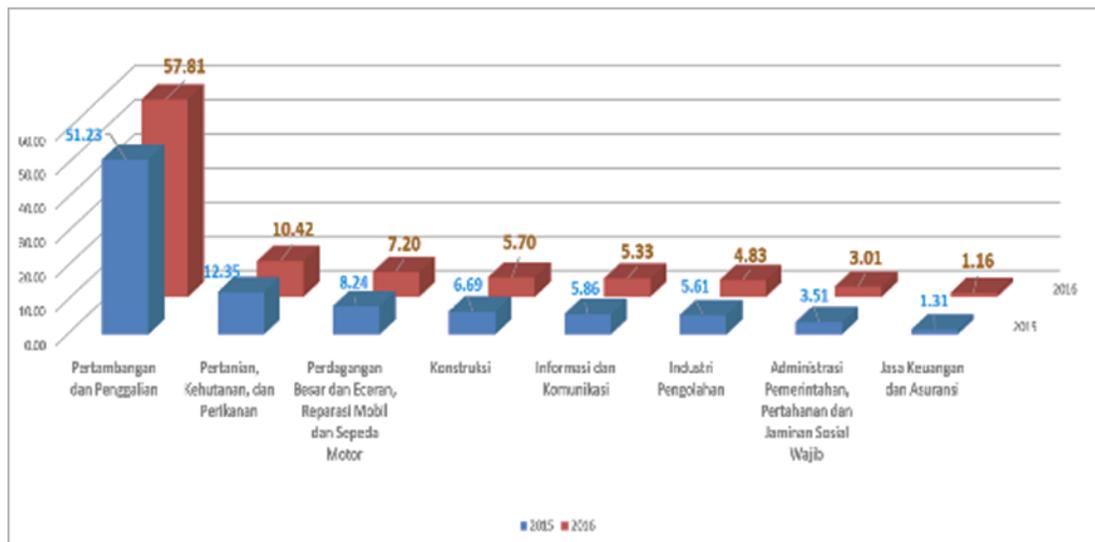
jadi faktor utama dalam peningkatan pajak sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selama ini lebih banyak di *support* (secara signifikan) oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Dengan demikian, pilihan untuk “bermain” di pajak bumi dan bangunan bukanlah menjadi pilihan rasional. Hal ini juga diperkuat dengan data target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014 hingga 2016 yang tidak mengalami perubahan yakni jumlahnya sebesar 24.255.000.000 rupiah atau dengan kata lain tidak terdapat pertumbuhan terhadap target penerimaan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari PBB-P2 pada periode 2014-2016.

Tabel 6. Kepala Daerah (Kab/Kota) yang Tidak Mengubah Target PBB-P2 pada Periode Kedua Masa Jabatan

No.	Kab/Kota	Periode Jabatan		Pertumbuhan Penerimaan PBB	
		I	II	2015	2016
1	Kab. Bojonegoro	2008-2013	2013-2018	0.00%	0.00%
2	Kab. Situbondo	2010-2015	2016-2021	73.41%	0.00%
3	Kab. Tuban	2011-2016	2016-2021	11.80%	0.00%
4	Kab. Jember	2005-2010	2010-2015	-16.67%	0.00%

Sumber: data DJPK diolah



Gambar 5. PDRB ADHB Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Bojonegoro

Bupati yang telah menjabat selama dua periode tersebut yakni: 2008-

2013 (periode pertama) dan 2013-2018 (periode kedua) memilih untuk tidak

mengubah target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada masa jabatannya yang kedua karena dapat dikatakan bahwa bupati tersebut lebih memilih untuk menghindari konflik dengan masyarakat. Konflik disini dapat diterjemahkan sebagai keluhan/kekecewaan masyarakat yang akhirnya harus (tidak harus) mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah daerah. lebih spesifik, kebijakan yang ditempuh tersebut jauh berbeda jika dibandingkan sampel yang diteliti dari total 18 kabupaten/kota di Jawa Timur di mana mayoritas kepala daerah (14 kepala daerah atau 77,78%) memilih untuk menaikkan target penerimaan daerah yang bersumber dari PBB-P2 pada masa jabatan periode kedua.

Sedangkan untuk Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Jember penyebab tidak dilakukannya perubahan terhadap target penerimaan PBB-P2 dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain: indeks daya beli masyarakat dan distribusi PDRB terhadap Jawa Timur sebagaimana berikut.

1) Indeks Daya Beli Masyarakat

Tabel 7. Indeks Daya Beli Daerah Tahun 2014-2016

Daerah	2014	2015	2016	Peringkat
Jember	0.64	0.64	0.65	32
Situbondo	0.65	0.66	0.67	29
Tuban	0.67	0.67	0.68	26

Sumber: diolah dari data BPS Jawa Timur

Ditinjau dari Indeks daya beli masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Tuban, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang hidup di tiga kabupaten tersebut memiliki indeks daya beli yang rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila pemerintah daerah kesulitan dalam mengubah target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

2) Distribusi PDRB Daerah

Tabel 8. Distribusi PDRB (ADHB) Tahun 2015-2016

Share PDRB	ADHB		Peringkat di Jatim
	2015	2016	
Situbondo	0.87	0.87	26
Tuban	2.84	2.80	12
Jember	3.32	3.35	9

Sumber: diolah dari data BPS Jawa Timur

Ditinjau dari distribusi PDRB Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Tuban diketahui bahwa Kabupaten Situbondo memiliki distribusi PDRB kurang dari 1 persen dan Kabupaten Tuban kurang dari 3 persen serta Kabupaten Jember pada kisaran 3 persen. Distribusi ini jika dilihat berdasarkan peringkatnya, diketahui bahwa Kabupaten Situbondo berada di peringkat bawah (26) dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengindikasikan nilai PDRB yang tidak besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Akan tetapi, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Jember karena kedua daerah tersebut memiliki distribusi yang tidak dapat dikatakan kecil. (lihat tabel 9). Maka perlu untuk melihat sektor apa yang menjadi kontributor dominan pada Kabupaten Tuban dan Jember.

Tabel 9. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kabupaten Tuban Menurut Lapangan Usaha

Sektor		2015	2016
C	Industri Pengolahan	30.81	30.69
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.36	18.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.13	13.52
F	Konstruksi	12.09	11.67

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Tuban

Data BPS menunjukkan bahwa baik pada tahun 2015 maupun 2016, kontribusi terbesar atas PDRB di Kabupaten Tuban berasal dari industri pe-

ngolahan. Dengan kondisi indeks daya beli dari masyarakat Kabupaten Tuban yang rendah dan PDRB Kabupaten Tuban didominasi oleh industri pengolahan, maka hal ini memperkuat alasan bagi kepala daerah Kabupaten Tuban untuk tidak mengubah target PBB-P2 pada periode tersebut.

Sedangkan Kabupaten Jember, diketahui bahwa distribusi PDRB daerah tersebut tidak dapat dikatakan kecil karena termasuk dalam 10 besar kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap Provinsi Jawa Timur. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, maka didapati bahwa kontributor terbesar PDRB Kabupaten Jember berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini diperkuat pula dengan posisi indeks daya beli masyarakat Kabupaten Jember yang berada pada peringkat 32 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 10. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha

	Sektor	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.66	30.21
C	Industri Pengolahan	19.86	19.55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.59	12.93

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Jember

Dengan demikian, menjadi tampak mengapa kepala daerah Kabupaten Jember sulit untuk mengubah target PBB-P2.

Target yang Menurun

Daerah-daerah yang mengalami penurunan target penerimaan PBB-P2 namun masih mencatatkan pertumbuhan yang positif terlihat sebagaimana pada Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, dan Kota Blitar. Hal ini terindikasi karena rendahnya PDRB pada daerah tersebut yang juga merefleksikan tingkat daya

beli masyarakatnya (*purchasing power parity*) yang rendah.

Tabel 11. Indeks Daya Beli Daerah Tahun 2014-2016

Daerah	2014	2015	2016	Peringkat
Kab. Bondowoso	0.68	0.69	0.70	22
Kab. Kediri	0.69	0.70	0.71	21
Kab. Lamongan	0.69	0.70	0.71	18
Kota Blitar	0.75	0.76	0.77	5

Sumber: diolah dari data BPS Jawa Timur

Melihat indeks daya beli untuk Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Lamongan dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakatnya berada pada kategori menengah namun tidak dengan Kota Blitar yang berada kategori 5 besar dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 12. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha

	Sektor	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.4	30.7	30.0
C	Industri Pengolahan	21.5	21.6	21.8
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	15.3	15.6	15.8

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Bondowoso

Peningkatan target penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bondowoso memiliki pola yang sejalan dengan kategori pertama (target meningkat). Setelah menjabat pada periode kedua, maka kepala daerah mulai meningkatkan target tersebut tanpa harus mempertimbangkan faktor kehilangan basis suara untuk pemilihan kepala daerah. Namun menjadi pertimbangan pula bahwa peningkatan terhadap target penerimaan PBB-P2 tidak sebesar pada kategori pertama (kategori tar-

get meningkat) dikarenakan kepala daerah akan tetap mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. Jika ditinjau dari distribusi PDRB (persentase), diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Bondowoso lebih banyak ditopang dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan, reparasi mobil & sepeda motor. Dengan peningkatan daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, maka tidak ada pertimbangan yang memberatkan bagi kepala daerah untuk menaikkan target penerimaan PBB-P2.

Hal yang sama juga terjadi untuk Kabupaten Kediri di mana kegiatan ekonomi Kabupaten Kediri banyak didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan namun indeks daya beli masyarakat Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari 0,6 menjadi 0,7. Dalam hal ini, maka kepala daerah yang sedang memimpin tidak akan ragu untuk menaikkan target PBB-P2 namun tidak secara signifikan.

Tabel 13. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha

Sektor	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.62	24.17	23.67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.42	20.45	20.59
Industri Pengolahan	19.19	19.42	19.6

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Kediri

Kondisi yang tidak jauh berbeda pada Kabupaten Kediri juga terjadi di Kabupaten Lamongan namun hal yang membedakan adalah indeks daya beli masyarakat Kabupaten Lamongan dapat dikatakan lebih baik karena berada pada peringkat 18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 14. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha

Sektor	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.21	36.8	36.27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.46	19.72	19.94
Konstruksi	10.77	10.35	10.4

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Lamongan

Hal yang berbeda terjadi di Kota Blitar di mana indeks daya beli masyarakatnya, Kota Blitar berada pada peringkat 5 yang tidak lagi dapat dikatakan rendah atau menengah. Walaupun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar bagi perekonomian Kota Blitar, namun sektor jasa keuangan dan asuransi juga berkontribusi secara signifikan. Hal ini dipicu oleh tingginya transaksi keuangan yang masuk ke Kota Blitar yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Tabel 0-1. Distribusi Persentase PDRB ADHK 2010 Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha

Sektor	2014	2015	2016
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.82	23.95	24.03
J Informasi dan Komunikasi	12.27	12.32	12.45
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10.1	10.28	10.4

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Blitar

Peningkatan target penerimaan PBB-P2 dengan kondisi yang ada di Kota Blitar diketahui bahwa pada tahun 2016 tidak terjadi perubahan yang signifikan karena pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah harus mempertimbangkan besaran pertumbuhan pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2015 yang telah mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 43,60 persen.

Secara umum, keempat Daerah yang mengalami perubahan target penerimaan PBB namun tidak signifikan yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, dan Kota Blitar dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 16. Kepala Daerah (Kab/Kota) yang Menurunkan Target PBB pada Periode Kedua Masa Jabatan

No.	Kab/Kota	Periode Jabatan	
		I	II
1	Kab. Bondowoso	2008-2013	2013-2018
2	Kab. Kediri	2010-2015	2016-2021
3	Kab. Lamongan	2010-2015	2016-2021
4	Kota Blitar	2010-2015	2016-2021

Sumber: data DJPK diolah

Tabel 16 menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2016 tersebut disebabkan oleh sudah terjadinya peningkatan target penerimaan PBB-P2 secara signifikan pada tahun sebelumnya. Sehingga, walaupun terjadi pertumbuhan secara positif, namun pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa pada periode kedua masa kepemimpinan, seorang kepala daerah akan meningkatkan target penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tanpa harus takut kehilangan basis masa (suara) namun tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakatnya. Selain itu, faktor ketercapaian target juga menjadi pertimbangan bagi kepala daerah ketika hendak meningkatkan target penerimaan PBB-P2. Hal ini tampak pula pada bagaimana rasio antara ketercapaian (realisasi) dan target PBB-P2 yang telah ditetapkan.

Tabel 17. Rasio Realisasi terhadap Target PBB-P2

Daerah	2014	2015	2016
Kota Blitar	0.81	1.07	1.04
Kab. Bondowoso	1.71	1.22	1.00

Kab. Lamongan	2.20	0.94	1.01
Kab. Kediri	1.01	1.02	1.03

Sumber: data diolah

Peningkatan target yang dilakukan oleh Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Kediri masih dianggap rasional karena rasio realisasi terhadap target PBB-P2 menunjukkan angka yang relevan kecuali pada Kabupaten Bondowoso di tahun 2014 dan Kabupaten Lamongan di tahun yang sama. Dikarenakan tingkat keberhasilan pencapaian target yang signifikan tersebut, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan target (tahun 2015) secara signifikan. Namun ketika tingkat keberhasilan mengalami kegagalan (ditunjukkan melalui rasio di bawah 1), maka penyesuaian dilakukan dengan cara menurunkan pertumbuhan atas target penerimaan PBB-P2.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan (sebagaimana penjabaran pada bab-bab sebelumnya) berkaitan dengan PBB-P2 dengan pemilihan kepala daerah periode kedua, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu terbukti adanya keterkaitan antara kenaikan target penerimaan PBB-P2 dengan periodisasi kepala daerah (bupati dan/atau walikota). Di mana kepala daerah yang mencalonkan lagi sebagai kepala daerah untuk periode kedua, maka kebijakan terhadap PBB-P2 akan bersifat longgar namun akan kembali ketat ketika kepala daerah tersebut telah definitif terpilih kembali. Namun demikian, keterkaitan ini tidak terjadi pada daerah (kabupaten dan atau kota) dengan kondisi tertentu yakni: i) Daerah yang memiliki sumber penerimaan lain yang lebih utama yang lebih besar, ii) Daerah dengan kepala daerah yang terlibat pada suatu kasus hukum, dan iii) Kepala daerah yang hendak melanggengkan “dinasti”-nya.

Berdasarkan hal tersebut, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah diperlukan pengamatan yang lebih terperinci dan mendalam untuk masing-masing daerah (kabupaten/kota) untuk mengungkap tidak hanya besaran target penerimaan PBB-P2 namun juga berbagai masalah dan kepentingan yang muncul dibalik “angka” target dan realisasi yang terjadi. Selain itu, pengamatan waktu yang lebih lama dan obyek penelitian yang lebih luas juga dibutuhkan agar lebih mampu menjelaskan (masalah dan kepentingan) yang menjadi latar belakang terbentuknya besaran angka target penerimaan PBB-P2 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2), 1–20.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur. *Perspektif*, 16(1), 12–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.66>
- Calance, M., Diacon, P.-E., & Donici, A.-N. (2014). Conspiratorial Reasoning and Economics. *CES Working Papers*, 6(4), 29–42. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1655117164?accountid=46437>
- Congleton, R. D. (2001). Rational Ignorance, Rational Voter Expecations, and Public Policy: A Discrete Information Foundation for Fiscal Illusion. *Public Choice*, 17(1–2), 35–64. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/30026254>
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2), 63–74.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Junaidi, V. (2010). Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 41–72. Retrieved from <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/245/241>
- Kartodirdjo, S. (1974). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alterlatif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leiser, D., Duani, N., & Wagner-Egger, P. (2017). The Conspiratorial Style in Lay Economic Thinking. *Plos One*, 12(3), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171238>
- Long, N. V. (2010). *A Survey of Dynamic Games in Economics (Vol. 1)*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Manihuruk, V. (2019). Bupati Majalengka Turunkan Nilai Pajak di Sembilan Kecamatan. Retrieved from pikiran-

- rakyat.com website:
<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01308558/bupati-majalengka-turunkan-nilai-pajak-di-semilan-kecamatan?page=2>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 73–84.
- Nurbawono, S. (2016). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.197>
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 80–94. Retrieved from <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jak/article/view/253>
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu: Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), 1–7. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621>
- Oktavia, D. (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1407>
- Purwadinata, S. (2016). Kontribusi Royalti PT Newmont Nusa Tenggara Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2012. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2), 1–23.
- Rothstein, B., & Stolle, D. (2008). The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust. *Comparative Politics*, 40(4), 441–459. <https://doi.org/https://doi.org/10.5129/001041508X12911362383354>
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–10. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/43>
- Sugiono. (2004). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyana, R. P., Samudro, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Partai Politik, Kepala Daerah dan Performa Ekonomi Regional: Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(1), 113–138.
- Sunstein, C. R., & Vermeule, A. (2008). *Conspiracy Theories* (No. Harvard Public Law Working Paper No. 08-03; U of Chicago, Public Law Working Paper No. 199; U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper

- No. 387).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1084585>
- Susilo, M. W. (2017). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Daerah serta Isu Pengalihan Pengelolaan PBB-P3 untuk Mendorong Kemandirian Keuangan Daerah. Retrieved from www.academia.edu website: https://www.academia.edu/24550740/Peranan_Pajak_Bumi_dan_Bangunan_sebagai_Sumber_Pendapatan_Daerah_serta_Isu_Pengalihan_Pengelolaan_PBB-P3_untuk_Mendorong_Kemandirian_Keuangan_Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Uscinski, J. E. (2018). The Study of Conspiracy Theories. *Argumenta*, 3(2), 233–245. <https://doi.org/10.23811/53.arg2017.usc>
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, 9(1), 81–89. Retrieved from <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/32/23>
- Zait, A., Andrei, A. G., Bobalca, C. S., & Tugulea, O. (2017). Empowering Civic Minded Citizens in Knowledge-Based Society. In F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Berbegal-Mirabent, & R. Bastida (Eds.), *18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017)*.